

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah merupakan kebijakan yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam perlindungan anak jalanan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat yang lainnya. Melihat kondisi yang ada saat ini jumlah anak jalanan di beberapa kabupaten yang pada awalnya mengalami peningkatan, sehingga pemerintah dan tenaga kerja yang lainnya membuat suatu program yang dimana dapat mengurangi jumlah anak jalanan yang masih berkeliaran. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis ingin mengetahui peran pemerintah kabupaten dalam perlindungan anak jalanan terhadap pemenuhan hak pendidikan dan standart dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (status approach). Hasil penelitian adalah bahwa peran pemerintah kabupaten dalam mengatasi anak jalanan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan adanya program-program pemerintah dan tenaga kerja lainnya untuk mengatasi jumlah anak jalanan sudah belum sepenuhnya berhasil, karena masih ada beberapa anak jalanan yang masih berkeliaran dijalanan. Terkait dengan standart perlindungan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, ketiga kabupaten yang sebagai contoh tersebut sudah sesuai dengan standart yang ada. Manfaat penelitian ini diharapkan bagi semua aparat penegak hokum, orang tua, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan hak-hak yang harus dimiliki oleh anak dan lebih memperhatikan perkembangan anak dalam kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan, Anak Jalanan.